

Perilaku Society 5.0 Pada Sektor Pemerintahan: Implementasi Aparatur Provinsi Banten

Society 5.0 Behavior in the Government Sector: Implementation of Banten Provincial Apparatus

Muhammad Dwi Nurfaishal

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang, Banten, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Vol. 1, No. 01
Hal : 119-129
Diterbitkan : 01 Juli 2025

Abstrak

Era Society 5.0 menghadirkan tantangan dan peluang bagi aparatur pemerintah dalam meningkatkan efektivitas organisasi melalui pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perilaku organisasi pada aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam menghadapi atau bertransformasi di era society 5.0 menuju kemudahan dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis studi kasus dari data yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Society 5.0 sangat bergantung pada kesiapan teknologi, budaya organisasi, serta keterampilan digital aparatur. Resistensi terhadap perubahan dan kurangnya literasi digital bagi aparatur di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten menjadi kendala utama pada implementasi konsep society 5.0. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan strategis yang dapat meningkatkan kapabilitas aparatur dalam mengadopsi teknologi baru bahkan memberikan inovasi pembaharuan

Kata Kunci: Perilaku Organisasi, Society 5.0, Aparatur Pemerintahan, Transformasi Digital, Pemerintahan Provinsi Banten

Abstract

The Society 5.0 era presents challenges and opportunities for government officials in increasing organizational effectiveness through the use of digital technology. This study aims to analyze organizational behavior in officials within the Banten Provincial Government in facing or transforming in the era of society 5.0 towards ease and efficiency in providing services to the community. This study uses a qualitative approach with a case study analysis method from relevant data. The results of the study indicate that the success of the implementation of Society 5.0 is highly dependent on the readiness of technology, organizational culture, and digital skills of the officials. Resistance to change and lack of digital literacy for officials within the Banten Provincial Government are the main obstacles to the implementation of the society 5.0 concept. Therefore, a strategic policy is needed that can increase the capabilities of officials in adopting new technologies and even providing innovations.

Keywords: Organizational Behavior, Society 5.0, Government Officials, Digital Transformation, Banten Provincial Government

No. Handphone:
0813-3358-0611
E-mail:
dosen03014@unpam.ac.id

Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 menandai era baru dalam otomatisasi dan digitalisasi di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga penguatan pada sektor layanan publik. Dengan hadirnya Revolusi Industri 5.0, fokus tidak hanya pada teknologi canggih, tetapi juga pada harmonisasi antara Sumber Daya Manusia (SDM) dan *tools* (Wibowo, 2023).

Konsep *society 5.0* pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang sebagai *respons* terhadap Revolusi Industri 4.0. *Society 5.0* tidak hanya berfokus pada pengembangan teknologi digital, tetapi juga pada integrasi teknologi dengan kehidupan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan manusia (Fukuyama, 2020). Implementasi *society 5.0* pada sektor pemerintahan mencakup pemanfaatan kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), serta *big data* dalam pengelolaan administrasi publik (Kumar & Sharma, 2021).

Munculnya konsep *society 5.0* diharapkan membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan, terutama dalam aspek perilaku organisasi aparatur negara. Pemerintah Provinsi Banten perlu mengadopsi perubahan ini guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik (Hidayat et al., 2022). Transformasi digital dalam birokrasi tidak hanya berimplikasi pada sistem kerja, tetapi juga mengubah perilaku dan budaya organisasi (Sari & Wijaya, 2021). Konsep ini menuntut kesiapan dari berbagai aspek, termasuk infrastruktur teknologi, kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebijakan yang adaptif (Purnomo, 2023).

Perubahan ini dirasakan secara signifikan di berbagai kota dan kabupaten di Provinsi Banten, seperti Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Lebak. Masing-masing wilayah memiliki tantangan yang berbeda dalam menerapkan *society 5.0* dalam administrasi pemerintahan mereka. Misalnya, Kota Tangerang yang sudah lebih maju dalam adopsi sistem digital dibandingkan Kabupaten Lebak yang masih menghadapi kendala infrastruktur teknologi (Fauzan et al., 2022). Kota Tangerang telah menerapkan berbagai inovasi *smart city*, termasuk pelayanan publik berbasis aplikasi dan sistem digitalisasi administrasi yang mempercepat birokrasi. Hal ini menunjukkan kesiapan infrastruktur yang cukup baik di kota ini.

Selain Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang masih menghadapi tantangan besar dalam digitalisasi pemerintahan. Infrastruktur telekomunikasi yang belum merata, akses internet yang terbatas di beberapa wilayah pedesaan, serta minimnya literasi digital di kalangan aparatur menjadi kendala utama dalam implementasi *society 5.0* di daerah tersebut (Handayani et al., 2022). Aparatur di wilayah ini masih banyak yang menggunakan sistem manual dalam pengelolaan administrasi pemerintahan, yang menghambat efisiensi pelayanan publik.

Kota Cilegon, sebagai daerah industri yang berkembang pesat, memiliki potensi besar dalam menerapkan *society 5.0*. Dengan adanya sektor industri yang maju, digitalisasi dalam administrasi pemerintahan dapat meningkatkan efisiensi dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat dan dunia usaha (Amalia & Kusuma, 2023). Namun, tantangan lain muncul dalam bentuk resistensi terhadap perubahan dari aparatur yang terbiasa dengan metode kerja konvensional. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas menjadi faktor kunci dalam kesuksesan transformasi digital di wilayah ini.

Kota Serang yang merupakan ibu kota provinsi, telah menunjukkan perkembangan dalam penerapan *society* 5.0 melalui sistem administrasi berbasis digital. Namun, permasalahan seperti keamanan siber dan kesenjangan keterampilan digital di kalangan aparatur masih menjadi hambatan utama (Santoso et al., 2021). Kabupaten Pandeglang masih bergulat dengan tantangan akses teknologi yang terbatas dan rendahnya literasi digital di kalangan aparatur (Handayani et al., 2022). Pemerintah daerah telah berupaya mengatasi hal ini dengan mengadakan pelatihan dan sosialisasi mengenai teknologi informasi, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut agar seluruh aparatur dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan digital.

Penelitian ini menyoroti bagaimana perilaku organisasi aparatur di beberapa daerah yang ada di Provinsi Banten dapat menjadi faktor pendorong atau penghambat dalam implementasi *society* 5.0. Oleh karena itu, strategi yang lebih spesifik diperlukan agar digitalisasi dapat merata di seluruh wilayah Provinsi Banten.

Dengan menyoroti perbedaan kondisi antar daerah, penelitian ini berusaha menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan *society* 5.0 dalam organisasi pemerintahan di berbagai daerah di Provinsi Banten. Dengan pendekatan berbasis data, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam mempercepat adopsi digital dalam birokrasi (Santoso et al., 2021).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis dan memahami perilaku organisasi *society* 5.0 yang diterapkan pada aparatur di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten. Metode pengumpulan dan pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, berasal dari sumber yang relevan. Analisis data dilakukan dengan teknik *content analysis*, artinya setiap sumber data atau literasi dikaji secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta strategi adaptasi dalam implementasi *society* 5.0 pada sektor pemerintahan di Provinsi Banten. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menyusun sintesis temuan yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan strategi implementasi *Society* 5.0 dalam pelaksanaan pelayanan pada sektor pemerintahan di Provinsi Banten.

Hasil Dan Pembahasan

1. Strategi Adaptasi Aparatur Pemerintahan terhadap *Society* 5.0

Dalam menghadapi era *Society* 5.0, aparatur pemerintahan di Provinsi Banten menerapkan berbagai strategi adaptasi, di antaranya:

a) Peningkatan Kompetensi Digital

Aparatur diberikan pelatihan intensif dalam pemanfaatan teknologi informasi. Pelatihan ini meliputi penguasaan aplikasi *e-government*, keamanan siber, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (Wijaya, 2023). Selain itu, pelatihan ini juga mencakup literasi data dan penggunaan analisis *big data* dalam proses pengambilan kebijakan. Program pelatihan ini diadakan secara berkala untuk memastikan peningkatan keterampilan digital aparatur dalam menghadapi transformasi digital (Setiawan, 2023).

Sebagai contoh yang telah berjalan, evaluasi terhadap pelatihan menunjukkan hasil bahwa kompetensi digital aparatur meningkat signifikan setelah mengikuti

pelatihan selama enam bulan (Prasetyo, 2022). Pelatihan berbasis praktik langsung dengan skenario dunia nyata lebih efektif dibandingkan pendekatan teori semata (Lestari & Ahmad, 2023). Selain itu, keterlibatan akademisi dalam penyusunan modul pelatihan turut meningkatkan kualitas kurikulum yang disajikan (Yusuf, 2023).

b) Implementasi *E-Government*

Pemerintah Provinsi Banten mulai menerapkan sistem *e-government* untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Digitalisasi layanan administrasi, pembayaran pajak online, serta integrasi data antarinstansi menjadi prioritas (Nugroho & Astuti, 2022). Dengan penerapan teknologi informasi yang optimal, diharapkan birokrasi menjadi lebih transparan, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu manfaat utama dari implementasi *e-government* adalah peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data dan dokumen pemerintahan. Sistem digital memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan akurat, mengurangi kemungkinan kesalahan akibat administrasi manual (Setiawan, 2023). Selain itu, sistem ini juga mendukung konsep *smart governance* yang berorientasi pada pelayanan berbasis teknologi dan *data-driven decision making*.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan *e-government*, partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan. Kendala yang ditemukan adalah rendahnya literasi digital di beberapa kelompok masyarakat dalam mengadopsi layanan daring yang disediakan oleh pemerintah (Sukma, 2022). Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat serta penggunaan sistem *e-government* perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih aktif dalam mengakses layanan publik secara digital.

c) Kolaborasi dengan Sektor Swasta

Kerja sama antara pemerintah dengan perusahaan teknologi dalam pengembangan aplikasi pelayanan publik berbasis digital, diharapkan mampu menerapkan teknologi terkini serta pengelolaan data yang lebih optimal sesuai dengan kebutuhan saat ini (Putra & Dewi, 2023). Dengan dukungan sektor swasta, pemerintah dapat mempercepat digitalisasi layanan publik, termasuk sistem administrasi *online*, pembayaran pajak elektronik, serta pengelolaan informasi kependudukan berbasis *cloud*.

Salah satu keuntungan utama dari kolaborasi ini adalah efisiensi dalam pengembangan infrastruktur digital. Pemerintah dapat memanfaatkan keahlian dan sumber daya perusahaan teknologi untuk membangun *platform* yang aman dan mudah diakses oleh masyarakat (Santoso, 2022). Selain itu, model kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership*) juga memungkinkan pengurangan beban anggaran negara dalam pengadaan dan pemeliharaan teknologi informasi.

Dengan strategi yang tepat, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat transformasi digital dalam layanan publik. Keberhasilan kemitraan ini tidak hanya bergantung pada adopsi teknologi yang canggih, tetapi juga pada tata kelola yang transparan, standar regulasi yang ketat, serta dukungan masyarakat dalam pemanfaatan layanan berbasis digital.

d) Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)*

Pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam administrasi pemerintahan semakin berkembang sebagai bagian dari transformasi digital menuju *Society 5.0*. AI

digunakan dalam berbagai aspek, termasuk otomatisasi proses administrasi, pengelolaan data, serta peningkatan layanan publik. Salah satu implementasi yang paling umum adalah penerapan sistem pengarsipan elektronik berbasis AI, yang memungkinkan dokumen tersusun dengan lebih rapi dan mudah diakses kapan saja (Santoso, 2022).

Penggunaan AI dalam sistem pengarsipan membantu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan mempercepat proses pencarian data, sehingga meningkatkan efisiensi kerja aparatur (Wijaya, 2023). Selain itu, AI diterapkan dalam pengembangan *chatbot* untuk pelayanan publik. *Chatbot* berbasis AI memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dan layanan secara cepat tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan. Teknologi ini mampu menjawab pertanyaan umum terkait layanan administrasi, seperti pembuatan kartu identitas, pembayaran pajak, atau perizinan usaha (Putra & Dewi, 2023).

Keunggulan utama dari *chatbot* adalah kemampuannya untuk beroperasi 24 jam, memberikan respons otomatis yang akurat, dan mengurangi beban kerja aparatur dalam menangani pertanyaan rutin (Rahmat, 2023). Lebih jauh, AI juga dimanfaatkan dalam sistem prediksi dan analisis kebijakan. Dengan memanfaatkan *machine learning* dan *big data*, pemerintah dapat melakukan analisis tren sosial, ekonomi, dan kependudukan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*) (Nugroho & Astuti, 2022).

Misalnya, algoritma AI dapat menganalisis pola pengaduan masyarakat dan merekomendasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Penerapan analitik prediktif ini membantu pemerintah dalam mengantisipasi masalah serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yusuf, 2023). Namun, meskipun AI membawa banyak manfaat, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur digital dan kesiapan sumber daya manusia. Tidak semua aparatur memiliki keterampilan dalam mengoperasikan sistem berbasis AI, sehingga diperlukan pelatihan yang komprehensif agar implementasi AI berjalan optimal (Fahmi & Sari, 2023). Selain itu, aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama, mengingat sistem berbasis AI dapat menjadi target serangan siber jika tidak dilengkapi dengan perlindungan yang memadai (Susanto, 2022).

Dengan berbagai manfaat dan tantangan tersebut, pemanfaatan AI dalam administrasi pemerintahan perlu diiringi dengan kebijakan yang mendukung, seperti regulasi tentang keamanan data, peningkatan kompetensi digital aparatur, serta investasi dalam pengembangan infrastruktur teknologi. Keberhasilan implementasi AI dalam sektor pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh teknologi itu sendiri, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam mengadopsinya secara efektif dan berkelanjutan (Hidayat, 2023).

e) **Penguatan Infrastruktur Digital**

Dalam era digitalisasi, infrastruktur digital menjadi elemen kunci dalam mendukung efektivitas layanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Pemerintah Provinsi Banten terus berupaya memperkuat infrastruktur digital, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas internet di daerah terpencil. Peningkatan jaringan internet ini dilakukan melalui pengembangan

infrastruktur telekomunikasi, seperti pemasangan *fiber optic*, pembangunan menara *Base Transceiver Station (BTS)*, serta kerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memperluas jangkauan konektivitas (Yunus & Rahayu, 2022).

Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh wilayah di Banten, termasuk desa-desa yang masih mengalami keterbatasan akses internet, dapat terhubung dengan sistem layanan digital secara optimal (Prasetyo, 2023).

Selain memperluas jaringan internet, Pemerintah Provinsi Banten juga menerapkan sistem keamanan siber yang lebih ketat guna melindungi data dan informasi pemerintahan. Seiring dengan meningkatnya digitalisasi layanan publik, risiko serangan siber juga semakin tinggi, terutama terhadap sistem administrasi kependudukan, perizinan, serta data keuangan daerah (Sutanto, 2023).

Oleh karena itu, pemerintah mengadopsi teknologi *firewall* canggih, sistem deteksi ancaman siber berbasis *Artificial Intelligence (AI)*, serta melakukan pelatihan kepada aparatur sipil negara (ASN) tentang tata kelola keamanan data (Rahman & Dewi, 2023). Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan digital pemerintahan daerah serta meminimalkan potensi kebocoran atau penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (Hasan, 2022).

Lebih jauh, penguatan infrastruktur digital juga mencakup pengembangan pusat data daerah (*data center*) yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan informasi strategis pemerintahan. Dengan adanya *data center* yang terintegrasi, layanan publik dapat lebih efisien karena data dapat diakses dengan cepat oleh berbagai instansi terkait tanpa perlu proses birokrasi yang berbelit-belit (Fadilah, 2023).

Selain itu, keberadaan *data center* juga mendukung implementasi konsep *smart governance*, di mana pengambilan keputusan dapat berbasis analisis data yang lebih akurat dan real-time (Kurniawan, 2022). Namun, meskipun telah dilakukan berbagai upaya penguatan infrastruktur digital, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Banten. Salah satunya adalah masih rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan aparatur pemerintahan, yang menyebabkan kurang optimalnya pemanfaatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Mulyana, 2023).

Selain itu, pembangunan infrastruktur digital memerlukan anggaran yang besar serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan akademisi, untuk memastikan keberlanjutannya (Putri & Santoso, 2023). Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun strategi jangka panjang yang mencakup edukasi digital bagi masyarakat serta peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan berbagai langkah yang telah dilakukan, penguatan infrastruktur digital di Provinsi Banten diharapkan dapat mempercepat transformasi digital dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Konektivitas internet yang merata, sistem keamanan siber yang kuat, serta pengelolaan data yang lebih baik akan menjadi pondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan efisien. Keberhasilan dalam penguatan infrastruktur digital ini juga akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta memperkuat daya saing Banten di tingkat nasional maupun global (Saputra, 2023).

2. Hambatan dalam Penerapan *Society 5.0* di Lingkungan Pemerintah

Walaupun banyak strategi telah diterapkan, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi aparatur dalam mengimplementasikan *society 5.0*, seperti:

a) Resistensi terhadap Perubahan

Salah satu tantangan utama dalam penerapan konsep *Society 5.0* di lingkungan pemerintahan adalah resistensi terhadap perubahan. Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih nyaman dengan sistem kerja konvensional dan merasa enggan untuk beradaptasi dengan teknologi digital yang terus berkembang (Fahmi & Sari, 2023). Sikap ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketakutan akan kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi, kurangnya pemahaman terhadap teknologi, serta keterbatasan keterampilan digital yang dimiliki oleh ASN (Rahman & Dewi 2023).

Resistensi ini juga diperparah oleh pola pikir yang masih mempertahankan birokrasi manual dalam proses administrasi pemerintahan. Beberapa aparatur lebih memilih metode lama yang dianggap lebih aman dan terjamin, meskipun sebenarnya kurang efisien dibandingkan dengan sistem digital (Putra & Dewi, 2023). Selain itu, perubahan teknologi sering kali dianggap sebagai beban tambahan karena memerlukan adaptasi yang cukup kompleks dalam jangka waktu singkat (Sutrisno, 2022).

Untuk mengatasi hambatan ini, pemerintah perlu melakukan pendekatan yang lebih persuasif, seperti memberikan pelatihan teknologi secara berkala, mendorong perubahan budaya kerja berbasis digital, serta menyediakan sistem insentif bagi aparatur yang menunjukkan adaptasi baik terhadap transformasi digital (Hidayat, 2023). Selain itu, kepemimpinan yang visioner dan proaktif sangat diperlukan agar perubahan dapat diterima secara luas oleh aparatur.

Perubahan organisasi yang mendukung implementasi *society 5.0* juga harus dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan kepanikan di kalangan aparatur. Penyediaan pendampingan dan sistem dukungan teknis dapat membantu ASN yang mengalami kesulitan dalam memahami teknologi baru (Lestari & Ahmad, 2023). Dengan demikian, resistensi terhadap perubahan dapat diminimalkan, dan transformasi digital di lingkungan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif.

b) Keterbatasan Infrastruktur Digital

Hambatan lain dalam penerapan *society 5.0* di lingkungan pemerintah adalah keterbatasan infrastruktur digital, terutama di daerah yang masih memiliki akses internet terbatas. Beberapa wilayah di Provinsi Banten masih mengalami kesenjangan dalam ketersediaan jaringan internet yang stabil, sehingga menghambat efektivitas implementasi sistem e-government (Rahmat, 2023). Hal ini berdampak pada lambatnya proses digitalisasi layanan publik, seperti pengarsipan elektronik, sistem perizinan online, dan integrasi data antarinstansi (Susanto, 2022).

Selain akses internet, infrastruktur digital yang masih terbatas juga meliputi kurangnya perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung transformasi digital di instansi pemerintah. Beberapa kantor pemerintahan masih menggunakan komputer dan sistem operasi yang sudah usang, sehingga tidak kompatibel dengan aplikasi digital terbaru yang diterapkan dalam *society 5.0* (Sutrisno, 2022).

Tantangan ini memerlukan intervensi dari pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital. Investasi dalam peningkatan kapasitas jaringan, pemasangan *fiber optic*, serta pengadaan perangkat digital yang lebih modern menjadi solusi yang harus segera dilakukan. Selain itu, pemerintah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memastikan bahwa seluruh wilayah memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital (Lestari & Ahmad, 2023).

Pembangunan infrastruktur digital juga harus didukung oleh kebijakan yang mendorong percepatan akses internet di daerah terpencil. Program penguatan jaringan internet desa, seperti pemasangan menara BTS dan pemanfaatan teknologi satelit, dapat menjadi solusi jangka panjang dalam mengatasi hambatan ini (Putra & Dewi, 2023). Dengan adanya infrastruktur digital yang lebih memadai, implementasi *society 5.0* di pemerintahan akan berjalan lebih optimal.

c) **Keamanan Data dan Privasi**

Keamanan data menjadi tantangan krusial dalam implementasi *society 5.0* di lingkungan pemerintah. Seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam administrasi publik, risiko kebocoran data dan serangan siber juga semakin tinggi (Susanto, 2022). Data pribadi masyarakat, informasi keuangan daerah, serta dokumen pemerintahan rentan terhadap peretasan jika tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang memadai (Rahman & Dewi 2023).

Beberapa kasus kebocoran data di sektor pemerintahan telah menunjukkan bahwa sistem keamanan siber di Indonesia masih perlu diperkuat. Serangan siber dapat mengganggu operasional pemerintahan, menyebabkan kehilangan data penting, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap layanan berbasis digital (Sutrisno, 2022). Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan siber menjadi prioritas utama dalam penerapan *society 5.0*.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan data meliputi penggunaan sistem enkripsi yang kuat, penerapan otentikasi dua faktor (*two-factor authentication*), serta pengawasan ketat terhadap akses data oleh aparatur pemerintah. Selain itu, pemerintah perlu menggandeng ahli keamanan siber untuk mengembangkan protokol keamanan yang lebih ketat dalam sistem *e-government* (Lestari & Ahmad, 2023).

Selain teknologi, kesadaran akan pentingnya keamanan data juga harus ditanamkan pada aparatur pemerintah. Pelatihan rutin tentang *cyber hygiene* dan tata kelola data yang baik dapat membantu mengurangi risiko kebocoran informasi yang disebabkan oleh kelalaian pengguna (Putra & Dewi, 2023). Dengan penerapan strategi keamanan yang komprehensif, transformasi digital dalam pemerintahan dapat berjalan dengan lebih aman dan terpercaya.

3. **Dampak Implementasi *Society 5.0* terhadap Efektivitas Aparatur**

Transformasi digital yang menjadi inti dari konsep *society 5.0* telah mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, baik dari segi efisiensi administrasi, kualitas layanan publik, maupun akuntabilitas dan transparansi. Inovasi berbasis teknologi ini tidak hanya membantu meningkatkan kinerja aparatur, tetapi juga mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data. Oleh karena itu, *society 5.0* diharapkan

mampu mewujudkan birokrasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Wijaya, 2023).

a) Peningkatan Efisiensi Administrasi

Implementasi teknologi dalam administrasi pemerintahan telah membawa perubahan signifikan dalam efisiensi kerja aparatur. Sistem digital mempercepat proses birokrasi, mengurangi tumpukan dokumen fisik, serta meningkatkan kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem digital, proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu lama dapat diselesaikan dalam hitungan menit, meningkatkan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Wijaya, 2023).

Selain itu, otomatisasi proses administrasi mengurangi beban kerja pegawai negeri, sehingga mereka dapat lebih fokus pada tugas strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Implementasi *e-government*, misalnya, memungkinkan integrasi data antarinstansi sehingga meningkatkan koordinasi dan mengurangi duplikasi kerja (Santoso, 2021).

b) Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Digitalisasi memungkinkan layanan publik yang lebih cepat, akurat, dan transparan, yang berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Layanan berbasis teknologi, seperti e-KTP dan sistem pembayaran pajak online, telah menghilangkan kendala administratif yang sebelumnya menjadi hambatan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik (Nugroho & Astuti, 2022).

Selain itu, penerapan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam layanan publik meningkatkan prediksi kebutuhan masyarakat dan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif. Dengan data yang tersedia secara *real-time*, pemerintah dapat segera mengatasi permasalahan dan meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan (Rahayu, 2020).

c) Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Sistem berbasis data memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan berbasis bukti, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan. Dengan sistem digital, setiap transaksi keuangan dan kebijakan yang dibuat dapat ditelusuri kembali, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi (Putra & Dewi, 2023).

Selain itu, keterbukaan informasi yang didorong oleh teknologi digital memberikan akses bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan adanya partisipasi publik yang lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis (Sutrisno, 2022).

Kesimpulan

Dalam era *society 5.0*, transformasi digital menjadi aspek krusial dalam meningkatkan efektivitas pemerintahan, terutama dalam sektor pelayanan publik. Studi ini menunjukkan

bahwa terdapat banyak kendala untuk menuju implementasi konsep *society 5.0* di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Hal tersebut sangat bergantung pada kesiapan teknologi, budaya organisasi, serta kapabilitas digital aparatur. Meskipun terdapat berbagai upaya strategis dalam mengadopsi teknologi, tantangan seperti resistensi terhadap perubahan dan rendahnya literasi digital masih menjadi kendala utama yang menghambat proses transformasi.

Kurang siapnya adopsi *society 5.0* dipengaruhi oleh pembangunan infrastruktur digital yang tidak merata di seluruh wilayah Provinsi Banten. Seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi. Kesenjangan ini menuntut kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan pemerataan akses digital bagi seluruh wilayah.

Daftar Pustaka

- Amalia, R., & Kusuma, A. (2023). Digital Transformation in Local Government: Case of Cilegon City. *Journal of Public Administration Studies*, 12(1), 45-63.
- Fadilah, R. (2023). *Strategi Pembangunan Data Center untuk Pemerintahan Daerah*. Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen, 8(2), 101-115.
- Fahmi, R., & Sari, N. (2023). Resistensi Aparatur terhadap Digitalisasi Pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45-60.
- Fauzan, H., Setyawan, R., & Widodo, T. (2022). Smart City Implementation and Digital Readiness in Tangerang. *Journal of Regional Development*, 9(2), 78-95.
- Fukuyama, F. (2020). *Society 5.0 and the Digital Transformation of Governance*. Tokyo: Springer.
- Handayani, M., Kurnia, D., & Sari, P. (2022). Challenges of Digital Governance in Rural Areas. *Journal of E-Government and Policy*, 14(3), 112-129.
- Hasan, U. (2022). *Keamanan Siber dalam Administrasi Publik: Tantangan dan Solusi*. Jurnal Keamanan Digital, 6(3), 89-102.
- Hidayat, A., Rahman, T., & Sutanto, R. (2022). Bureaucratic Adaptation in Digital Transformation. *Indonesian Journal of Public Policy*, 11(4), 130-147.
- Hidayat, M. (2023). *Regulasi dan Kebijakan Keamanan Data dalam Transformasi Digital Pemerintahan*. Jurnal Kebijakan Publik, 11(2), 102-115.
- Kumar, S., & Sharma, R. (2021). Digital Governance and Public Administration: An Empirical Analysis. *Journal of Digital Government Research*, 8(2), 45-67.
- Kurniawan, D. (2022). *Implementasi Smart Governance melalui Infrastruktur Digital*. Jurnal Manajemen Pemerintahan, 9(4), 134-148.
- Lestari, A., & Ahmad, B. (2023). Efektivitas Pelatihan Digital dalam Meningkatkan Kompetensi Aparatur. *Jurnal Manajemen Publik*, 21(1), 55-72.
- Nugroho, R., & Astuti, P. (2022). *E-Government Implementation in Indonesia: Challenges and Opportunities*. *Journal of Public Administration*, 15(2), 45-58.
- Purnomo, E. (2023). Organizational Behavior in Digital Bureaucracy: Case Study in Banten. *Journal of Public Sector Management*, 15(1), 20-38.
- Prasetyo, B. (2023). *Aksesibilitas Internet di Wilayah Terpencil: Studi Kasus Provinsi Banten*. Jurnal Telekomunikasi dan Infrastruktur, 5(2), 78-93.

- Prasetyo, J. (2022). Evaluasi Pelatihan Digitalisasi dalam Pemerintahan. *Public Administration Review*, 16(2), 35-50.
- Putra, A., & Dewi, F. (2023). *Public-Private Collaboration in E-Government Development: Opportunities and Challenges*. *Journal of Digital Transformation*, 10(2), 55-70.
- Putri, A., & Santoso, Y. (2023). *Kolaborasi Pemerintah dan Swasta dalam Penguatan Infrastruktur Digital*. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 10(1), 85-99.
- Rahayu, S. (2020). *Artificial Intelligence dan Implementasi dalam Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, T., & Dewi, L. (2023). *Tata Kelola Keamanan Data dalam Pemerintahan Digital*. *Jurnal Sistem Informasi Publik*, 11(2), 115-128.
- Rahmat, H. (2023). *Efektivitas Chatbot dalam Meningkatkan Responsivitas Layanan Pemerintahan*. *Jurnal Inovasi Pelayanan Publik*, 10(1), 75-89.
- Santoso, D., Wijaya, B., & Putri, L. (2021). The Role of Digital Literacy in Enhancing Government Efficiency. *Journal of Governance and Innovation*, 10(2), 85-100.
- Santoso, R. (2022). *The Role of Technology Companies in Public Sector Digitalization*. *Indonesian Journal of Public Administration*, 9(3), 112-130.
- Saputra, J. (2023). *Transformasi Digital dalam Pemerintahan: Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, 12(3), 200-214.
- Sari, N., & Wijaya, A. (2021). Digital Bureaucracy: Implementation of Smart Governance. *Journal of Public Administration Review*, 8(3), 56-72.
- Setiawan, B. (2023). *Smart Governance and Digital Transformation in Public Sector*. *Indonesian Journal of Public Policy*, 12(3), 103-120.
- Sukma, L. (2022). *Digital Literacy and Public Participation in E-Government Services*. *Journal of Social Informatics*, 10(4), 89-101.
- Susanto, R. (2022). *Keamanan Siber dalam Implementasi AI di Lingkungan Pemerintah*. *Jurnal Keamanan Digital*, 5(3), 64-79.
- Sutanto, R. (2023). *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digitalisasi Pemerintahan*. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 9(1), 58-72.
- Sutrisno, H. (2022). *Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wibowo, A. (2023). *Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Wijaya, B. (2023). Pengaruh Digitalisasi terhadap Efektivitas Administrasi Pemerintahan. *Journal of Public Administration*, 19(1), 50-68.
- Yunus, M., & Rahayu, N. (2022). *Pembangunan Infrastruktur Digital di Provinsi Banten: Peluang dan Tantangan*. *Jurnal Ekonomi Digital dan Pembangunan Daerah*, 7(3), 122-137.
- Yusuf, K. (2023). Kurikulum Digitalisasi untuk Aparatur Pemerintah. *Journal of Public Policy*, 17(3), 75-90.